

## **PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA**

Rachmi Julinda Mulianingsih, Darsono<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
radenrararachmijulin@students.undip.ac.id

### **Abstract**

*This study was aimed to examine the effect of corporate governance structure and financial distress on the width of voluntary disclosure. Voluntary disclosure is a disclosure that other than what is required. This disclosure is influenced by various factors, including the seven variables used in this study. The result of this study will show whether the seven variables have an effect on increasing or decreasing voluntary disclosure.*

*This study used the secondary data which was annual reports retrieved from Indonesia Stock Exchange (IDX) website and company's website. This study used purposive sampling method. 276 companies were selected as samples from 494 companies as the population during 2017-2019. The research method used in this study was multiple linear regression. Agency theory is used in this study to formulated seven hypotheses that lead to the result of the analysis.*

*The result of this study indicated that financial distress had a negative and significant effect on voluntary disclosure. The proportion of audit committee, the audit committee meetings frequency, and competency of audit committee had a positive and significant effect on voluntary disclosure. The result of this study also indicated that board of commissioner independence, board of commissioner meetings frequency, and board of commissioner competency had no effect on voluntary disclosure.*

*Keywords : Corporate governance, financial distress, voluntary disclosure*

### **PENDAHULUAN**

Perusahaan perlu meningkatkan kepercayaan publik dengan memperbanyak informasi yang diungkap pada laporan tahunan. Peraturan otoritas Jasa Keuangan NO.29/POJK.04/2016 menjelaskan bahwa laporan tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam Poluan dan Nugroho (2015), kualitas informasi yang perusahaan laporkan dapat tercermin dari luasnya pengungkapan pelaporan tersebut. Transparansi perusahaan juga dapat terrefleksi dari luasnya pengungkapan pelaporan. Informasi yang dimuat laporan tahunan berupa informasi non-keuangan dan keuangan. Menurut sifatnya, informasi-informasi yang disajikan oleh perusahaan dapat berupa informasi pengungkapan

---

sukarela (*voluntary disclosure*) dan informasi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). dalam POJK NO.29/POJK.04/2016 laporan tahunan wajib, paling sedikit memuat ; ikhtisar data keuangan penting, informasi saham, laporan direksi, laporan dewan komisaris dan direksi, profil perusahaan emiten atau perusahaan publik, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, laporan keuangan yang telah di audit, dan surat pernyataan anggota direksi tentang tanggung jawab atas laporan tahunan. Dalam Healy dan Palepu (1993) walaupun perusahaan listing sudah berkewajiban untuk memenuhi standar minimal dalam pengungkapan laporan keuangan namun, pada praktiknya terdapat perbedaan substansial mengenai hal-hal yang diungkap perusahaan ke pasar modal karena tidak ada standar khusus yang mengatur banyaknya informasi sukarela yang akan diungkapkan. Kredibilitas perusahaan dapat menjadi lebih baik bila pengungkapan sukarela dilakukan secara luas sehingga investor dapat terbantu dalam menilai risiko, peluang dan mengurangi kesalahan dalam membuat keputusan investasi. Bisnis yang semakin kompleks serta perubahan lingkungan sekitar dapat memicu tuntutan penambahan informasi (Financial Accounting Standards Board 2001). Pengungkapan sukarela yang diungkapkan secara luas juga diperlukan untuk menghindari adanya asimetri informasi yang dapat memicu adanya konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham, disamping itu praktik pengungkapan sukarela memiliki kontribusi dalam menurunkan biaya agensi yang timbul akibat terjadinya asimetri informasi antara pihak principal dan agen.

Perbedaan luas pengungkapan suatu perusahaan bergantung pada keadaan perusahaan itu sendiri. Dalam penelitian Gantjowati (2014) perusahaan yang berada dalam keadaan *distress* akan cenderung membatasi pengungkapan atas pelaporan keuangannya menjadi lebih sedikit dari pada perusahaan yang sehat. Perusahaan dengan keadaan *distress* akan lebih hati-hati saat melaporkan laporan keuangannya karena dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaan di pasar modal. Berbeda dengan Yuniasih *et al.*, (2014), dalam penelitiannya perusahaan dengan *financial distress* dan luas pengungkapan sukarela tidak memberikan pengaruh, karena perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi sukarela apabila informasi sukarela tersebut mempunyai manfaat melebihi biaya pengungkapannya. Di Indonesia, buruknya pengelolaan manajemen banyak berakar dari lemahnya implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga menjadi sebab munculnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.KEP/49/M.EKON/11/2004 mengenai pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) merupakan komite yang menerbitkan pedoman mengenai praktik *good corporate governance*. *Corporate Governance* adalah alat untuk melakukan akuntabilitas dan transparansi agar dalam jangka waktu panjang perusahaan dapat tumbuh dan menguntungkan Pada dasarnya faktor utama yang mempengaruhi keterbukaan informasi terutama yang bersifat sukarela adalah *corporate governance* structure dalam perusahaan. *Corporate governance structure* digunakan untuk mendorong transparansi dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan sehingga *corporate governance structure* yang dipakai dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris

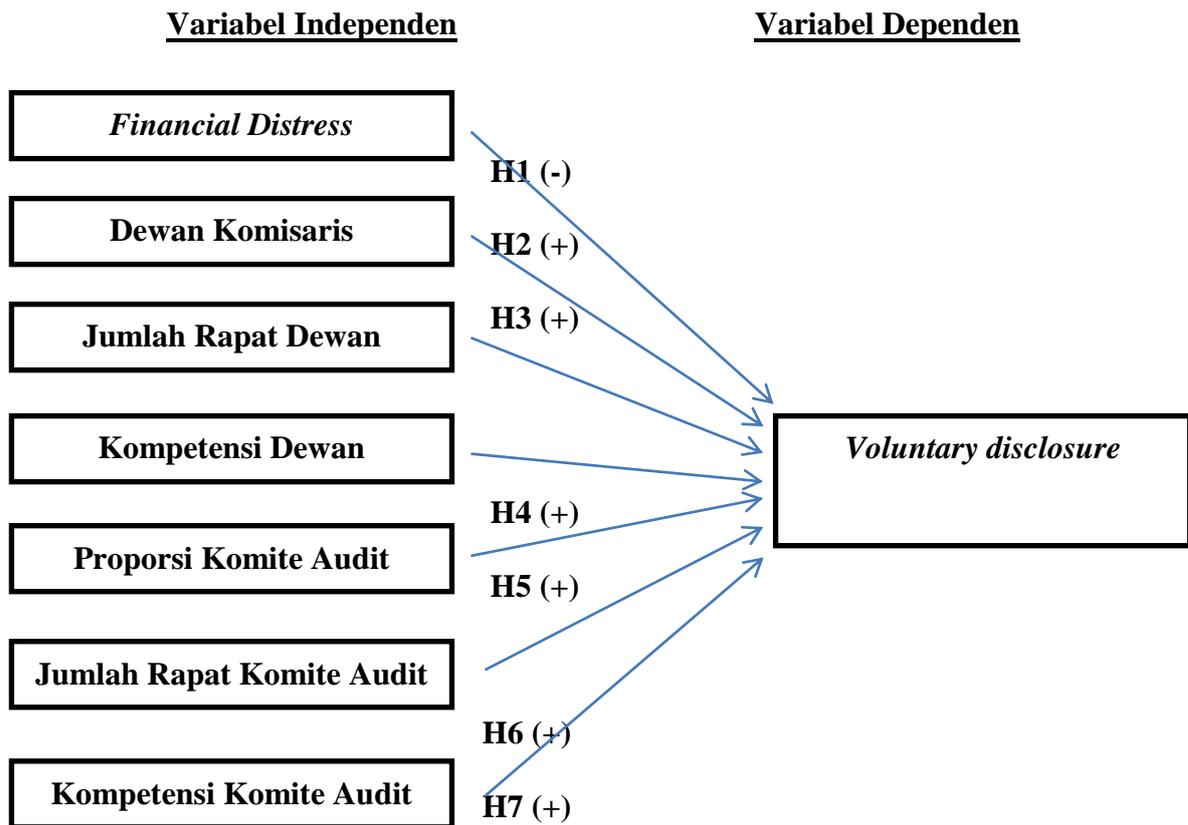
independen, jumlah rapat dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, proporsi komite audit, jumlah rapat komite audit, dan kompetensi komite audit.

### **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan bertujuan agar asimetri informasi yang terjadi antara *agen* dan *principal* dapat dikurangi. Pengungkapan sukarela disajikan agar mampu meningkatkan nilai perusahaan, transparansi juga kredibilitas perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan diberi kebebasan menentukan hal-hal yang diungkap dalam pengungkapan sukarela, sehingga akan timbul variasi pelaporan antara satu perusahaan dengan yang lain. Variasi pelaporan dalam pengungkapan sukarela di perusahaan dianggap dapat dipengaruhi oleh: *financial distress* dan struktur *corporate governance* didalamnya terdapat proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, proporsi komite audit, jumlah rapat komite audit, dan kompetensi komite audit.

*Financial distress* adalah kondisi dimana sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi, keadaan keuangan perusahaan menurun. yang mana keadaan tersebut dapat membuat perusahaan melakukan pengungkapan sukarela lebih sedikit dari pada perusahaan yang sehat. Dewan komisaris berfungsi memberikan pengawasan pada kinerja manajemen khususnya dalam hal pengungkapan. Pengawasan tersebut dilakukan agar manajemen tidak menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham. Di dalam jajaran dewan komisaris terdapat dewan komisaris independen yang merupakan anggota komisaris namun berasal dari luar perusahaan yang berfungsi menghadirkan iklim independen dan objektif. Sehingga dengan adanya komisaris independen tersebut dewan komisaris dapat memiliki kekuatan besar dalam memonitor manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi sukarela. selain itu, kompetensi dalam bidang akuntansi dan bisnis yang dimiliki dewan komisaris juga dapat memberikan pengaruh pada pengungkapan sukarela perusahaan karena dengan kompetensi tersebut diharapkan membuat kinerjanya lebih efektif dan mendorong praktik pengungkapan sukarela. Secara reguler dewan komisaris akan melakukan rapat sebagai media koordinasi dan komunikasi. Semakin seringnya rapat yang dilakukan maka semakin sering pula dewan komisaris saling bertemu yang mana diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasannya sehingga dapat meningkatkan pengungkapan perusahaan khususnya pengungkapan sukarela.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang memiliki tugas terpisah untuk membantu dewan komisaris melakukan fungsi monitoring atas kinerja manajemen. Komite audit yang mempunyai kompetensi dalam bidang keuangan atau akuntansi yang memadai adalah aspek penting yang berpengaruh pada luas pengungkapan sukarela. Sejalan dengan dewan komisaris, proporsi komite audit juga diwajibkan untuk memiliki rapat reguler sebagai media komunikasi dan koordinasi. Komite audit yang mempunyai frekuensi rapat reguler diharapkan dapat berdampak pada luas pengungkapan sukarela



### **Pengaruh *Financial Distress* pada Luas Pengungkapan Sukarela**

Gantowati (2014) menjelaskan bahwa perusahaan dengan status *financial distress* dan perusahaan dengan status sehat terbukti signifikan berbeda dalam memberikan luas pengungkapan sukarela. Perusahaan yang dengan status *distress* akan mengurangi pengungkapan sukarelanya dari pada perusahaan dengan status sehat.

Dalam perspektif agensi, agen yang mengetahui lebih banyak informasi mengenai kondisi actual perusahaan memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan informasi yang bersifat material untuk melindungi kepentingannya sehingga perusahaan dengan status *distress* akan berhati-hati dalam melaporkan laporan keuangannya dikarenakan kesalahan dalam ketidak hati-hatian tersebut dapat berpengaruh pada nilai pasar perusahaan di pasar modal. Dan sebaliknya, perusahaan yang tidak berstatus *distress* akan mengurangi keraguannya menyampaikan informasi dalam pelaporan keuangannya.

Berbeda dengan Yuniasih *et al.* (2014), yang menyatakan, perusahaan dengan kondisi *distress* tidak mempunyai pengaruh pada luas pengungkapan sukarela. Karena perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi sukarela apabila manfaat pengungkapan tersebut melebihi biaya pengungkapannya. Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka dirumuskan hipotesis berikut:

**H<sub>1</sub>:Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan melakukan pengungkapan sukarela yang lebih sedikit dari pada perusahaan yang tidak mengalami *financial distress***

### **Pengaruh Dewan Komisaris Independen pada Luas Pengungkapan Sukarela**

Fungsi utama komisaris independen yaitu menghadirkan iklim independen serta objektif dalam proses pengambilan keputusan saat melakukan pengawasan pada kinerja manajemen, memberikan saran dan timbal balik atas kinerja manajemen, serta memastikan manajemen perusahaan bekerja sesuai dengan prinsip dan aturan serta tidak melakukan penyimpangan.

Adanya anggota dewan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan transparansi perusahaan dan mengurangi terjadinya asimetri informasi di antara principal dan agen serta meningkatkan pengendalian perusahaan yang dapat berdampak pada kualitas pengungkapan yang lebih baik.

Samaha et al, (2012) menjelaskan bahwa komisaris independen dan pengungkapan sukarela mempunyai pengaruh positif signifikan. Dijelaskan di dalam Samaha et al (2012), semakin tinggi tingkat pengawasan dari dewan komisaris independen akan memaksa perusahaan mengdiungkapkan informasi pengungkapan sukarela yang lebih banyak, dikarenakan pihak independen menuntut transparansi yang lebih luas dilaporan tahunan perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>:Dewan komisaris independen berpengaruh positif pada luas pengungkapan sukarela**

### **Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris pada Luas Pengungkapan Sukarela**

Secara regular untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melakukan pengawasan atas kinerja manajemen, dewan komisaris akan melakukan rapat sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Rapat dewan komisaris akan membahas strategi, arah perusahaan, evaluasi kebijakan manajemen dan mengatasi masalah tentang benturan kepentingan (Forum for Corporate Governance Indonesia 2001)

Gantjowati (2014), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa rapat rutin yang diadakan dewan komisaris akan menyelesaikan masalah benturan kepentingan serta asimetri informasi dan mengevaluasi keputusan manajemen. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin seringnya rapat dewan komisaris maka pengungkapan sukarela juga akan makin luas. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>:Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif pada luas pengungkapan sukarela**

### **Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris pada Luas Pengungkapan Sukarela**

Dewan komisaris dengan kompetensi akuntansi atau bisnis merupakan anggota dewan komisaris yang telah menempuh latar belakang pendidikan maupun pengalaman bekerja dalam bidang akuntansi dan bisnis. Menurut kapasitas tugasnya sebagai dewan pengawas dan penasihat, keefektifan dewan komisaris sangat dipengaruhi oleh kompetensi dewan komisaris itu sendiri.

Penelitian Gunawan (2019), menyatakan bahwa dewan komisaris yang memiliki kompetensi dalam bidang bisnis dan akuntansi secara signifikan mempengaruhi pengungkapan sukarela. Adanya dewan komisaris yang memahami praktik akuntansi dan bisnis maka akan berdampak pada peningkatan pengendalian manajemen terutama pada aspek keterbukaan informasi kepada publik yang selama ini menjadi perhatian utama dalam mengatasi masalah perbedaan kepentingan dan asimetri informasi. Sehingga, proporsi dewan komisaris dengan keahlian akuntansi

atau bisnis akan mendorong perusahaan untuk lebih melakukan pengungkapan sukarela. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis berikut:

**H<sub>4</sub>:Kompetensi dewan komisaris berpengaruh positif pada luas pengungkapan sukarela**

#### **Pengaruh Proporsi Komite Audit pada Luas Pengungkapan Sukarela**

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris, memiliki tugas yang terpisah dalam membantu dewan komisaris melakukan fungsi monitoring atas kinerja manajemen. Peran lain komite audit adalah untuk memastikan kualitas tingkat pelaporan perusahaan dan memantau sistem pengendalian internal juga mengawasi hubungan antar auditor eksternal dengan manajemen perusahaan.

Madi *et al.* (2014) menjelaskan ukuran komite audit mempengaruhi luas pengungkapan sukarela secara signifikan. Ukuran komite audit merupakan faktor penting dalam meningkatkan pengungkapan sukarela. dengan adanya komite audit diharapkan mampu meningkatkan transparansi perusahaan dan mengurangi terjadinya asimetri informasi di antara principal dan agen serta meningkatkan pengendalian perusahaan yang berdampak pada kualitas pengungkapan yang lebih baik.

Penelitian Setiany *et al.* (2018) juga menjelaskan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran komite audit dengan luas pengungkapan. Ukuran komite audit adalah hal yang relevan dalam komite audit yang mempengaruhi pengungkapan sukarela, karena peran komite audit dalam mengawasi proses pelaporan pengungkapan sukarela terbukti ditentukan oleh besarnya jumlah komite audit yang dimiliki. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>5</sub>:Proporsi komite audit berpengaruh positif pada luas pengungkapan sukarela**

#### **Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit pada Luas Pengungkapan Sukarela**

Menurut ketentuan BAPEPAM-LK tahun 2012 Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan NO.KEP643/BL/2012 menyatakan adalah sebuah kewajiban untuk para komite audit melakukan rapat komite audit yang jumlahnya paling kurang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan begitu, diharapkan frekuensi pertemuan komite audit mampu meningkatkan koordinasi dan pengendalian serta pengawasan sehingga memberikan dampak peningkatan pengungkapan sukarela serta menyelaraskan informasi antara principal dan agen untuk menghindari *assymetric informasion* dan *agency problem*

Sedangkan Gantowati (2014) berdasarkan hasil dari analisis regresi berganda yang telah ia lakukan menjelaskan bahwa ada pengaruh yang signifikan di antara jumlah rapat komite audit dan luas pengungkapan sukarela. Semakin tinggi frekuensi rapat komite audit maka semakin tinggi pengungkapan sukarela. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>6</sub>:Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif pada luas pengungkapan sukarela**

#### **Pengaruh Kompetensi Komite Audit pada luas pengungkapan Sukarela**

Pernamasari (2018) memaparkan bahwa komite audit dengan kompetensi bisnis atau akuntansi berpengaruh secara signifikan pada luas pengungkapan sukarela. Komite audit yang paham dengan proses pengungkapan akan mengidentifikasi hal-hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan pengungkapan serta meminimalkan pembatasan pengungkapan.

Dengan adanya komite audit yang memiliki kompetensi dibidang bisnis dan akuntansi akan berdampak pada pengendalian perusahaan terutama pada aspek keterbukaan informasi pada publik sehingga dapat membantu mengatasi masalah perbedaan kepentingan dan asimetri informasi serta membantu mendorong perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi pada publik

Sedangkan BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) tahun 2012 membuat ketentuan tentang anggota komite audit wajib minimal satu anggota dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan di bidang akuntansi atau bisnis agar komite audit dapat memberikan kualitas pelaporan yang baik dan meningkatkan pengungkapan . Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis berikut:

**H<sub>7</sub>:Kompetensi komite audit berpengaruh positif pada luas pengungkapan sukarela**

## METODE PENELITIAN

### Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dari penelitian ini adalah luas pengungkapan sukarela. variabel independen dalam penelitian ini adalah *financial distress*, dewan komisaris independen, kompetensi dewan komisaris, rapat dewan komisaris, komite audit, kompetensi komite audit dan rapat komite audit

### Luas Pengungkapan Sukarela

Pengukuran luas pengungkapan sukarela dalam penelitian ini memakai *Voluntary disclosure Checklist* yang mengacu pada penelitian Gantjowati (2014) dan Pernamasari (2018). *Voluntary disclosure checklist tersebut* berisi atas item-item pengungkapan yang akan dicari dalam laporan tahunan perusahaan. Kemudian item-item yang sesuai dengan kriteria *voluntary disclosure* tersebut di scoring untuk mengetahui jumlah Total item yang sesuai dengan *voluntary disclosure checklist* yang ada pada laporan tahunan perusahaan

### *Financial Distress*

*Financial* diukur dengan menggunakan metode Altman *Z Score*. *Z score* untuk perusahaan manufaktur ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$Z\ score = 0,717T_1 + 0,847T_2 + 3,107 T_3 + 0,420 T_4 + 0,998 T_5$$

Keterangan:

- Z = *Overall Index*
- T<sub>1</sub> = Modal Kerja / Total Aset
- T<sub>2</sub> = Laba di Tahan / Total Aset
- T<sub>3</sub> = EBIT / Total Aset
- T<sub>4</sub> = Harga Pasar Saham di Bursa / Nilai Total Utang

$$T_5 = \text{Penjualan} / \text{Total Aset}$$

Nilai *Z Score* terbagi menjadi tiga tingkatan:

$$\begin{array}{llll} Z \text{ Score} > 2,9 & = & \text{sehat} \\ 1,23 < Z < 2,9 & = & \text{abu abu} \\ Z \text{ Score} < 1,23 & = & \text{distress} \end{array}$$

### **Dewan Komisaris Independen**

Variabel independensi komisaris diukur memakai prosentase jumlah anggota komisaris independen dibandingkan jumlah total seluruh anggota komisaris.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\%$$

### **Rapat Dewan Komisaris**

Secara regular, untuk melakukan tugas dan kewajibannya dewan komisaris akan melakukan rapat sebagai media komunikasi dan koordinasi. Jumlah rapat dewan komisaris yang dinyatakan dengan lambang RKOM diukur dengan melihat frekuensi rapat dewan komisaris selama satu tahun pada laporan keuangan tahunan.

### **Kompetensi Dewan Komisaris**

Dewan komisaris dengan kompetensi bisnis atau akuntansi adalah anggota dewan komisaris yang telah menempuh latar belakang pendidikan maupun pengalaman bekerja dalam bidang akuntansi atau bisnis. diukur dengan prosentase jumlah anggota dewan komisaris yang memiliki kompetensi di bidang bisnis atau akuntansi dengan total anggota dewan komisaris.

$$\begin{array}{l} \text{Kompetensi dewan komisaris} \\ = \frac{\text{dewan komisaris yang memiliki kompetensi}}{\text{jumlah seluruh dewan komisaris}} \times 100\% \end{array}$$

### **Proporsi Komite Audit**

Pembentukan komite audit oleh dewan komisaris adalah untuk membantu dewan komisaris melakukan fungsi monitoring atas kinerja manajemen sehingga membuat komite audit mempunyai akses langsung pada sistem pengendalian yang ada dalam perusahaan. Variabel komite audit diukur dengan cara menjumlah seluruh anggota komite audit dalam laporan tahunan perusahaan.

### **Kompetensi Komite Audit**

BAPEPAM-LK KEP-643/BL/2012 dijelaskan salah satu syarat keanggotaan dalam peraturan BAPEPAM adalah suatu kewajiban untuk memiliki paling sedikit satu anggota komite audit dengan latar belakang pendidikan atau kemampuan dalam bidang akuntansi atau bisnis untuk mempermudah kinerjanya dalam mencapai tujuan

Variabel kompetensi komite audit di bidang akuntansi atau bisnis diukur dari persentase jumlah anggota komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau bisnis dengan jumlah seluruh anggota komite audit

$$\text{KOMA} = \frac{\text{komite audit yang memiliki kompetensi}}{\text{jumlah seluruh komite audit}} \times 100\%$$

### Rapat Komite Audit

Rapat komite audit yaitu sebuah pertemuan sebagai media koordinasi di antara anggota-anggota komite audit untuk menjalankan tugas agar terlaksana secara efektif. Rapat komite audit ini bertujuan untuk melakukan perencanaan atas strategi pengawasan pada kinerja manajemen perusahaan, melakukan evaluasi kebijakan yang telah diambil maupun kebijakan yang akan datang.

Jumlah rapat komite audit diukur dengan melihat jumlah rapat yang dilakukan komite audit selama satu tahun pada laporan tahunan.

## HASIL DAN PEMBAHSAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Tabel 1

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan manufaktur terdaftar di BEI periode 2017-2019	494
2	Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di BEI satu tahun sebelum tahun penelitian	(59)
3	Perusahaan manufaktur yang laporan keuangannya tidak ditemukan di BEI maupun website perusahaan dan perusahaan yang laporan keuangannya rusak	(33)
4	Perusahaan manufaktur yang memakai mata uang non rupiah	(93)
5	Perusahaan manufaktur yang diberhentikan perdagangan efeknya oleh BI	(3)
6	Perusahaan manufaktur yang tidak mempunyai data lengkap terkait seluruh variabel penelitian	(30)
7	<b>TOTAL</b>	<b>276</b>

SuMber : Data sekunder yang di olah, 2020

Pada tahun 2017-2019 terdapat 494 perusahaan yang terdaftar di BEI. Perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi lengkap mengenai jumlah rapat dewan komisaris dan komite audit secara Nominal dikecualikan dari populasi penelitian karena tidak dapat memenuhi pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Selain itu perusahaan yang tidak mengungkapkan secara lengkap mengenai riwayat pendidikan dewan komisaris dan komite audit juga tidak dimasukkan kedalam populasi penelitian. Sampel akhir penelitian ini untuk kemudian dilakukan analisis adalah sebanyak 276 sampel.

**Statistik Deskriptif**

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Dev
DISTR	276	-5.90	185.72	4.55	14.36
IDKOM	276	1.00	5.00	1.69	0.78
RKOM	276	1.00	41.00	11.08	6.51
KOMDKOM	276	0.00	1.50	0.44	0.28
KOMA	276	2.00	4.00	2.97	0.34
RKOMA	276	3.00	38.00	6.83	4.91
KOMKA	276	0.00	1.00	0.70	0.30
IPS	276	16.0	36.00	29.94	3.83

Berdasarkan tabel 2, diperoleh informasi bahwa Total sampel pada penelitian ini berjumlah 276 sampel untuk masing-masing variabel. IPS merupakan proksi dari variabel dependen luas pengungkapan sukarela yang mempunyai nilai minimum -5.90 dan nilai maksimum 185.72, nilai rata-rata 4.55 dan standar deviasi 14.36.

IDKOM merupakan proksi dari variabel independensi dewan komisaris yang mempunyai nilai minimum 1.00 dan maksimum 5.00, nilai rata-rata 1.69 dan standar deviasi 0.78. RKOM adalah proksi dari rapat dewan komisaris yang mempunyai nilai minimum 1.00 dan maksimum 41, rata-rata 11.08 dan standar deviasi 6.51. KOMDKOM adalah proksi dari kompetensi dewan komisaris yang mempunyai nilai minimal 0.00 dan maksimal 1.50, rata-rata 0.44 dan standar deviasi 0.28. KOMA adalah proksi dari variabel komite audit, mempunyai nilai minimal 2.00 dan maksimal 4.00, rata-rata 2.97 dan standar deviasi 0.34. RKOMA adalah proksi untuk rapat komite audit dengan nilai minimal 3.00 dan maksimal 38.0, rata-rata 6.83 dan standar deviasi 4.91. KOMKA adalah proksi untuk kompetensi komite audit dengan nilai minimum 0.00 dan maksimum 1.00, rata-rata 0.70 dan standar deviasi 0.30

**Hasil Uji Hipotesis**

**Tabel 3**

Hipotesis	$\beta$ value	$\rho$ value	Hasil
H1 : perusahaan yang mengalami <i>financial distress</i> akan melakukan pengungkapan sukarela yang lebih sedikit dari pada perusahaan yang tidak mengalami <i>financial distress</i>	-0.045	0.002	Hipotesis 1 diterima
H2 : independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela	0.397	0.144	Hipotesis 2 ditolak
H3 : jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela	0.003	0.931	Hipotesis 3 ditolak
H4: Kompetensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela	-0.398	0.617	Hipotesis 4 ditolak

---

H5 : proporsi komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela	2.229	0.000	Hipotesis 5 diterima
H6 : jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela	0.165	0.000	Hipotesis 6 diterima
H7 : kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela	3.064	0.000	Hipotesis 7 diterima

---

### **Intepretasi Hasil**

#### **Pengaruh *Financial Distress* Pada Luas Pengungkapan Sukarela**

Hipotesis satu dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah *financial distress* berpengaruh pada luas pengungkapan sukarela. Hipotesis pertama menyatakan perusahaan dengan *financial distress* akan melakukan pengungkapan sukarela yang lebih sedikit dari pada yang tidak mengalami *financial distress*. hasil pengujian ini menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0.045 dan mempunyai nilai probabilitas 0.002 dimana nilai tersebut kurang dari 0.05. berdasarkan hasil tersebut *financial distress* memiliki pengaruh negatif secara signifikan pada luas pengungkapan sukarela..

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yuniasih et al, (2014) bahwa *financial distress* tidak memiliki pengaruh signifikan pada luas pengungkapan sukarela. Namun, sejalan dengan penelitian Gantowati (2014) yang menunjukkan *financial distress* secara signifikan berpengaruh negatif pada luas pengungkapan sukarela.

#### **Dewan Komisaris Independen Pada Luas Pengungkapan Sukarela**

Hipotesis dua dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah dewan komisaris independen berpengaruh pada luas pengungkapan sukarela. Hipotesis kedua menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif pada luas pengungkapan sukarela. hasil pengujian ini menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.397 dan mempunyai nilai probabilitas 0.144 dimana nilai tersebut melebihi 0.05. berdasarkan hasil tersebut dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada luas pengungkapan sukarela.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian (Gantowati 2014) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak mempengaruhi luas pengungkapan sukarela, namun tidak sejalan dengan penelitian Pernamasari (2018) yang menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen secara signifikan berpengaruh negatif pada luas pengungkapan sukarela.

#### **Jumlah Rapat Dewan Komisaris Pada Luas Pengungkapan Sukarela**

Hipotesis tiga dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah rapat dewan komisaris berpengaruh pada luas pengungkapan sukarela. Hipotesis ketiga bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif pada luas pengungkapan sukarela. hasil pengujian ini menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.003 dan nilai

probabilitas 0.931 dimana lebih dari 0,05 dimana lebih dari 0,05. berdasarkan hasil tersebut jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan pada luas pengungkapan sukarela.

Hasil tersebut tidak sejalan dengan hipotesis tiga yang di usulkan dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tiga ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Gantjowati 2014) bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak mempengaruhi luas pengungkapan sukarela, namun tidak sejalan dengan penelitian bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif secara signifikan pada luas pengungkapan sukarela.

### **Kompetensi Dewan Komisaris Pada Luas Pengungkapan Sukarela**

Hipotesis empat dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah kompetensi dewan komisaris berpengaruh pada luas pengungkapan sukarela. Hipotesis keempat menyatakan bahwa kompetensi dewan komisaris berpengaruh positif pada luas pengungkapan sukarela. Hasil pengujian ini menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0.398 dan nilai probabilitas sebesar 0.617 dimana lebih besar dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut kompetensi dewan komisaris tidak mempengaruhi luas pengungkapan sukarela

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pernamasari (2018) menunjukkan jumlah rapat dewan komisaris tidak mempengaruhi luas pengungkapan sukarela. namun, tidak sejalan dengan penelitian Gunawan (2019) bahwa dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan pada luas pengungkapan sukarela.

### **Intepretasi Hasil Komite Audit Pada Luas Pengungkapan Sukarela**

Hipotesis lima dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh pada luas pengungkapan sukarela. Hipotesis kelima menyatakan bahwa proporsi komite audit berpengaruh positif pada luas pengungkapan sukarela. Hasil pengujian ini menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 2.229 dan nilai probabilitas sebesar 0.000 dimana kurang dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, komite audit berpengaruh positif secara signifikan pada luas pengungkapan sukarela.

Penelitian ini sejalan dengan (Madi, Ishak, and Manaf 2014) dan (Setiany et al. 2018) menunjukkan komite audit berpengaruh secara signifikan pada luas pengungkapan sukarela. Namun, tidak sejalan dengan Yuniasih et al, (2014) menunjukkan komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan pada luas pengungkapan sukarela.

### **Rapat Komite Audit Pada Luas Pengungkapan Sukarela**

Dilakukan pengujian pada hipotesis enam untuk mengetahui apakah rapat komite audit berpengaruh pada luas pengungkapan sukarela. Hipotesis keenam menyatakan jumlah rapat komite audit berpengaruh positif pada pengungkapan sukarela. hasil pengujian ini menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.615 dan nilai probabilitas sebesar 0.000 dimana nilai tersebut kurang dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, rapat komite audit memberikan pengaruh positif secara signifikan pada luas pengungkapan sukarela.

Penelitian ini sejalan dengan (Gantjowati 2014) menunjukkan rapat komite audit berpengaruh positif signifikan pada luas pengungkapan sukarela. Tetapi tidak sejalan dengan Madi et al., (2014), Pernamasari, (2018) dan Setiany et al (2018),

rapat komite audit tidak memberikan pengaruh secara signifikan pada luas pengungkapan sukarela.

### **Kompetensi Komite Audit Pada Luas Pengungkapan Sukarela**

Dilakukan pengujian pada hipotesis tujuh untuk mengetahui apakah kompetensi komite audit berpengaruh pada luas pengungkapan sukarela. Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh positif pada luas pengungkapan sukarela. Hasil pengujian ini menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 3.064 dan mempunyai nilai probabilitas 0.000 dimana kurang dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, kompetensi komite audit berpengaruh positif signifikan pada pengungkapan sukarela.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Pernamasari (2018) kompetensi komite audit berpengaruh pada luas pengungkapan sukarela. Namun, tidak sejalan dengan Setiany et al., (2018) dan Madi et al., (2014) komite audit tidak memberikan pengaruh secara signifikan pada luas pengungkapan sukarela.

### **KESIMPULAN**

*Financial distress* berdampak negative secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. ini berarti Perusahaan dengan *financial distress* akan melakukan pengungkapan yang lebih sedikit dari pada yang tidak mengalami *financial distress*. Perusahaan dengan *financial distress* akan cenderung berhati-hati menyampaikan laporan keuangannya. Sebaliknya, perusahaan yang tidak mengalami *financial distress* akan lebih sedikit memiliki keraguan dalam penyampaian informasi laporan keuangan. Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. ini berarti perusahaan dengan jumlah dewan komisaris independen tinggi atau rendah tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. ini berarti tinggi rendahnya rapat dewan komisaris tidak memberikan pengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Kompetensi dewan komisaris tidak memberikan pengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. ini berarti kompetensi dari dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Komite audit berdampak positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Ini berarti semakin tinggi proporsi komite audit dapat menurunkan biaya agensi dan meningkatkan pengungkapan sukarela. hal tersebut dapat terjadi karena komite audit meningkatkan kualitas informasi yang diungkap antara principal dan agen dan sejalan dengan hal tersebut transparansi tata kelola perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Proporsi komite audit yang tinggi akan semakin meningkatkan kemampuan pemantauannya pada manajemen atau kinerja perusahaan sehingga mengurangi adanya kecurangan yang tidak diharapkan. Rapat komite audit berdampak positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Dalam teori keagenan, rapat komite audit adalah sarana peningkatan fungsi pengawasan antara principal dan agen agar meningkatkan transparansi pengungkapan sukarela. Kompetensi komite audit berdampak positif secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Ini disebabkan karena komite audit yang paham proses pengungkapan akan mengidentifikasi hal-hal yang mencurigakan yang berhubungan dengan pengungkapan dan meminimalkan pembatasan

pengungkapan karena komite audit memberitahu masalah yang harus diungkapkan perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terdapat batasan dalam penelitian ini yang pertama Indeks pengungkapan sukarela dalam penentuannya, terdapat unsur subjektifitas karena tidak ditemukan ketentuan baku untuk menjadi acuan, sehingga penentuan indeks untuk indicator dalam kategori pengungkapan sukarela dapat berbeda-beda. Dan yang kedua masih banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi mengenai variabel yang di teliti secara lengkap

Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini maka terdapat saran yang akan diberikan. Pertama, Menggunakan sektor lain selain manufaktur agar penelitian selanjutnya dapat mewakili seluruh perusahaan di Indonesia. Kedua, penelitian selanjutnya sebaiknya memperbarui waktu pengamatan agar lebih menggambarkan kondisi perusahaan di Indonesia yang terkini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Financial Accounting Standards Board. 2001. Steering Committee Report, Business Reporting Research Project *Improving Business Reporting: Insights into Enhancing Voluntary Disclosures*.
- Forum for Corporate Governance Indonesia. 2001. Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*.
- Gantowati, Evi. 2014. "The Impact of Financial Distress Status and Corporate Governance Structures on the Level of Voluntary Disclosure Within Annual Reports of Firms (Case Study of Non-Financial Firms in Indonesia Over the Period of 2009-2011)" pp. 389–494.
- Gunawan, Andrew. 2019. "The Role Of Corporate Governance Mechanism On Voluntary Disclosure." *Jurnal Akuntansi* 23(1): 127.
- Healy, Paul M, and Krishna G Palepu. 1993. "The Effect of Firms' Financial Disclosure Strategies on Stock Prices." *Accounting Horizons*.
- Madi, Hisham Kamel, Zuaini Ishak, and Nor Aziah Abdul Manaf. 2014. "The Impact of Audit Committee Characteristics on Corporate Voluntary Disclosure." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*.
- Pernamasari, Rieke. 2018. "Implementation of Good Corporate Governance and Voluntary Disclosure Compliance: 100 Compass Index Companies Listed Indonesian Stock Exchange (IDX) 2015-2016." *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences* 235–49.
- Poluan, Godeliva, and Paskah Ika Nugroho. 2015. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Kondisi Financial Distress Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Perusahaan." *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* Vol.4,(No.1): pp: 39-56.
- Samaha, Khaled, Khaled Dahawy, Khaled Hussainey, and Pamela Stapleton. 2012. "The Extent of Corporate Governance Disclosure and Its Determinants in a Developing Market: The Case of Egypt." *Advances in Accounting*.
- Setiany, Erna, Sri Hartoko, Djoko Suhardjanto, and Setianingtyas Honggowati. 2018. "Audit Committee Characteristics and Voluntary Financial Disclosure." *Review of Integrative Business and Economics Research* 6(3): 239–53.
- Yuniasih, Christina, Surya Dharma, and Paskah Ika Nugroho. 2014. "Corporate Governance, Financial Distress, and Voluntary Disclosure." *Proceedings of the International Conference on Managing the Asian Century*: 217–24.

